

TESIS

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN NOTARIS SEBAGAI PELAPOR DALAM
DUGAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN UNDANG-UNDANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**



Diajukan oleh:

RENDU FERNANDA, S.H

NIM. 18201230106

PEMBIMBING:

- 1. Dr. REMBRANDT, S.H., M.Pd**
- 2. Dr. YUSSY ADELINA MANNAS, S.H., M.H**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2022

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN NOTARIS SEBAGAI PELAPOR DALAM
DUGAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG JABATAN NOTARIS DAN UNDANG-UNDANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

(Rendu Fernanda, NIM. 1820123010, Program Studi Magister Kenotariatan, Program
Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, vi + 84 Halaman, 2022)

ABSTRAK

Profesi notaris yang terhormat yang bertugas melayani masyarakat di dalam bidang hukum perdata tidak seharusnya dijadikan sebagai sarana pencucian uang oleh pelaku pidana pencucian uang, oleh karena itu perlu ada yang mengatur mengenai profesi notaris sebagai pihak pelapor yang wajib melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan yang dilakukan para pihak yang menggunakan jasa notaris. Menyadari adanya kekosongan hukum, yang tidak mengharuskan notaris sebagai pihak pelapor atas transaksi keuangan yang mencurigakan, untuk menindak lanjutinya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan amanah dari pasal 17 ayat (2) Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Pengguna Jasa Bagi Notaris apakah penerapannya dan Pelaksanaan Kewajiban Notaris Sebagai Pelapor Dalam Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat diwujudkan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat Yuridis Empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan melalui wawancara untuk mendapatkan data primer. Disamping itu, dilakukan penelitian kepustakaan ununtuk mendapatkan data sekunder. Hasil Penelitian ini adalah (1) Pelaksanaan Kepastian Hukum Notaris Sebagai Pelapor Dalam Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Apabila Terjadi Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Akta Yang Dibuatnya yaitu adanya tujuan yang bertolak belakang antara peraturan jabatan notaries dan perangkat peraturan tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang membuat tidak dapat dilaksanakannya kepastian hukum bagi notaries sepagai pelapor, (2) Kendala Notaris Sebagai Pelapor Dalam Pelaksanaan Kepastian Hukum Notaris Sebagai Pelapor Dalam Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu adanya kendala peraturan perundang-undangan dan kendala rahasia jabatan notaries, (3) Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Pelapor Dalam Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh Notaris yaitu telah diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017.

Kata Kunci: Notaris, Notaris Sebagai Pelapor, Pencucian Uang

IMPLEMENTATION OF NOTARY OBLIGATIONS AS A REPORTER IN THE ALLEGED CRIMINAL ACT OF MONEY LAUNDERING REVIEWED FROM THE NOTARY POSITION LAW AND THE PREVENTION AND ERADICATION OF THE CRIMINAL ACTS OF MONEY LAUNDERING

(Rendu Fernanda, NIM. 1820123010, Master of Notary, Post-Graduate Program, Faculty of Law Andalas University, vi + 84 Pages, 2022)

ABSTRACT

out by the parties. using the services of a notary. Recognizing the existence of a legal vacuum, which does not require a notary to act as a reporting party for suspicious financial transactions, to follow up, the government issued Government Regulation Number 61 of 2021 an amendment to Government Regulation Number 43 of 2015 concerning Reporting Parties in the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering. is a mandate from article 17 paragraph (2) of Law number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering and the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 9 of 2017 concerning the Application of the Principle of Service Users for Notaries whether its implementation and the implementation of the obligations of a notary as The Whistleblower in the Alleged Crime of Money Laundering Judging from the Law on Notary Positions and the Law on Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering can be realized. The type of research used in this research is Juridical Empirical, namely research conducted directly in the field through interviews to obtain primary data. In addition, literature research was conducted to obtain secondary data. The results of this study are (1) the implementation of the legal certainty The honorable profession of a notary who is in charge of serving the public in the field of civil law should not be used as a means of money laundering by money laundering criminals, therefore it is necessary to regulate the profession of a notary as a reporting party who is obliged to report suspicious financial transactions carried of a notary as a reporter in the alleged crime of money laundering in terms of the law on the position of a notary and the law on the prevention and eradication of the crime of money laundering in the event of an alleged crime of money laundering against the deed he made, namely the existence of the conflicting objectives between the notary position regulations and the set of regulations regarding the eradication of money laundering crime make it impossible to implement legal certainty for notaries as reporters, (2) Obstacles of a notary as a reporter in implementing legal certainty of a notary as a reporter in an alleged crime of money laundering in terms of The Law on the Position of Notaries and the Law on Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering, namely the existence of statutory constraints and obstacles to the secrecy of the position of a notary, (3) The form of legal protection against a notary as a reporter in an alleged crime of money laundering against a deed made by a notary is regulated in the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 9 of 2017.

Keywords: Notary, Notary as a Reporter, Money Laundering